

BAB III

PARITY UNTUK PARLEMEN PERANCIS

Seiring dengan berjalannya waktu, nilai dan norma sosial terus berubah, perempuan juga mengalami berbagai kemajuan. Kaum perempuan mulai menunjukkan peningkatan dari segi kualitas dan kuantitasnya. Perkembangan ini terjadi di beberapa sektor seperti sosial, ketenagakerjaan, bahkan pendidikan. Akan tetapi tidak begitu halnya dalam politik, representasi perempuan masih sangat terbatas. Adanya budaya patriarki, bias gender, serta struktural yang menghambat laju pergerakan wanita dalam kancah politik.

Politik itu kotor, hal inilah yang menjadi momok dalam masyarakat. Sehingga perempuan yang feminin tidak sesuai bergelut dengan dunia politik. Selain itu dunia politik berorientasi pada penguasaan dan penindasan yang menimbulkan kemiskinan, kerusakan sumber daya alam, perang dan ketimpangan. Hal tersebut menambah nilai negatif pandangan perempuan dan mencegah mereka untuk masuk dalam gelanggang politik.

Menurut H. Mc Closky partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela dari warga negara melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam politik.

Apabila ditelusuri secara seksama, jumlah perempuan sangatlah sedikit dalam parlemen, jikapun ada menempati posisi yang tidaklah penting. Posisi ini selalu dipegang oleh kaum laki-laki. Biasanya mereka ditempatkan pada

posisi perpanjangan sosial, dimana posisi tersebut masih bisa dikendalikan oleh laki-laki. Hal ini dibenarkan oleh, H. Moore bahwa salah satu ciri yang penting dari kedudukan perempuan dalam masyarakat ialah adakalanya mereka mempunyai kekuasaan politik tetapi tidak mempunyai kekuatan, legitimasi, dan otoritas. Dalam banyak sistem politik di dunia sekarang ini, perempuan mempunyai kekuasaan politik, misalnya mereka mempunyai hak suara. Akan tetapi mereka kurang memiliki otoritas yang nyata dalam menjalankan kekuasaan tersebut.¹

Posisi yang tidak penting ini mengakibatkan kebijakan yang diambil dirasa kurang membawa manfaat dalam kehidupan sosial. Stereotipe gender yang dilekatkan pada perempuan misalnya tidak tegas, lamban dalam mengambil keputusan dan lemah, dipadukan dengan nilai-nilai androsentrisme yang tetap membelenggu hak-hak dan kebebasan kaum perempuan maupun mempertegas bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin. Argumentasi-argumentasi seperti ini yang mencegah perempuan menjadi seorang pemimpin dan menduduki jabatan-jabatan sentral dalam politik formal.

A. Sistem Politik Perancis

Perancis merupakan negara republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Konstitusi Republik Kelima disetujui pada 28 September 1958. Tahun 1962 konstitusi ini diamandemen dalam hal pemilihan presiden. Konstitusi

tertulis yang digunakan oleh Perancis lebih kaku dibandingkan dengan Negara lain.

1. Sistem Pemilihan Umum

Pada pemilihan umum di Perancis menggunakan sistem *Sistem Pluralitas Mayoritas* yang berbentuk *Two Round System (TRS)*, yang bertujuan untuk memilih Presiden dan anggota legislative Perancis. Sistem pemilihan umum Perancis dibedakan menjadi empat jenis, pertama, *Élections Municipales*, yakni pemilihan umum yang ditujukan memilih *le maire* sebutan untuk walikota dan *les conseillers municipaux* sebutan untuk commune yang dipilih untuk masa jabatan selama 6 tahun. *Élections Régionales*, yakni pemilihan umum untuk *les conseillers régionaux*, yang merupakan pemimpin sebuah région atau setingkat provinsi yang dipilih untuk masa jabatan 6 tahun. *Élection Legislatives*, yakni pemilihan untuk *les députés* atau anggota legislatif di Perancis, dipilih untuk masa jabatan 5 tahun. *Élections Présidentielles*, pemilihan umum Presiden Perancis (*le Président de la République française*) yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun.² Sistem pluralitas mayoritas memberikan kesempatan untuk langsung memilih para kandidatnya untuk wakil rakyat di unit pemilihan distrik, yang hanya dapat dimenangkan oleh satu kandidat yang mendapatkan suara terbanyak. Keuntungan sistem ini adalah, adanya tingkat akuntabilitas yang tinggi antara pemilih dan wakil rakyat yang dipilihnya. Sistem ini juga lebih sederhana karena tidak membuka manipulasi

² *Perbandingan Pemilihan Umum di Indonesia dan Perancis* (Akses 05 Agustus 2011); Sumber dari <http://adhelpz.blogspot.com/2008/05/tugas-tpn-eemanuel-susento.html>

partai politik untuk menominasikan kandidat. Kelemahan dari sistem ini adalah kecenderungan menguntungkan partai besar dan menghapuskan partai kecil atau kelompok minoritas termasuk perempuan. Kandidat perempuan umumnya tidak mampu memenangkan kompetisi langsung di pemilu sistem distrik.³ Setelah tahun 1958, saat terbentuknya Republik Kelima Perancis, sistem pemilihan dirubah dari *Proportional Representatif (PR)* menjadi sistem *Pluralitas Mayoritas*.⁴ Pengaruh sistem pemilu ini terlihat ketika pada tahun 1958, representasi perempuan menurun menjadi 1,4 persen dibandingkan tahun 1956 saat menggunakan PR representasi perempuan mencapai 3 persen.

2. Lembaga Pemerintahan

Ada dua lembaga pemerintahan di perancis, yakni lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Terdapat perbedaan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, menurut konstitusi, kekuasaan eksekutif adalah Dewan Menteri yang diketuai oleh Presiden. Kedua lembaga tersebut yang *pertama*, lembaga eksekutif Perancis memiliki dua pemimpin yakni Presiden dan Pemerintah, yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Presiden merupakan kepala negara yang dipilih universal oleh warga negara dewasa, untuk masa jabatan lima tahun. Pemilihan lembaga eksekutif terakhir dilakukan pada tahun 2007. Pemilihan Presiden sendiri dilakukan pada 22 April 2007 dan 6 Mei 2007 dan memunculkan Nicolas Sarkozy

³ Ani Widayanti Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, (Jakarta: Kompas, 2005), 124

⁴ Jocelyne Praud, "Gender Parity Reforms in France and Belgium: A Comparative Perspective," *Journal of Women's Studies*, 16 June 2008. (Access 05 August 2011); Sumber: University of British Columbia

sebagai presiden Perancis yang resmi menjabat sejak 16 Mei 2007. Sedangkan Perdana Menteri yang terpilih yakni Francois Fillon dan resmi menjabat sejak 17 Mei 2007. Nicolas Sarkozy mengungguli lawan-lawannya yang diusung partai lain dengan persentase suara 31, 2 persen pada pemilihan putaran pertama dibandingkan Segolene Royal yang mengantongi 25, 9 persen suara. Pada putaran kedua Sarkozy kembali unggul dengan 53, 1 persen suara dan Royal 46, 9 persen. Presiden memiliki kewenangan untuk memecat dan mengangkat para Menteri. Tugas dari Presiden adalah memimpin Dewan Menteri (*Council of Ministers*), presiden Republik berwenang untuk menugaskan Perdana Menteri, presiden juga harus membuat perjanjian dengan warga sipil dan negara menyangkut penempatan. Presiden memiliki kewajiban untuk menandatangani undang-undang yang dibuat oleh Dewan, dan mengumumkannya lima belas hari setelah penandatanganan. Perdana Menteri diangkat oleh presiden memiliki hak untuk mempertimbangkan apakah pemerintah bisa meraih suara mayoritas yang diperlukan di *National Assembly*. Seorang Perdana Menteri diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pengunduran diri.

Kedua, Lembaga Legislatif Perancis yang terdiri atas dua badan, yakni *Senat* dan *National Assembly*. Tugas dari ketua *National Assembly* dan ketua *Senat*, mengawasi ketertiban dalam proses pemilihan Presiden dan Parlemen, serta mengawasi pelaksanaan referendum. Akan tetapi, pada dasarnya mereka memiliki tugas masing-masing. *Senat* dipilih oleh *Electoral College* atau dewan lokal yang terdiri dari wakil municipal yakni perwakilan daerah-daerah atau kota yang ada di Perancis. Majelis dipilih untuk masa jabatan selama sembilan tahun namun

setelah 2004 akan dikurangi menjadi enam tahun. Dibandingkan dengan *National Assembly* kekuatan *Senat* sangat kecil dalam parlemen. Pada setiap perselisihan, *National Assembly* memiliki keputusan final, kecuali untuk hukum konstitusi dan *Lois Organiques* (hukum yang secara langsung disajikan oleh konstitusi) dalam beberapa kasus. *Senat* seringkali mendapatkan kritik sebagai lembaga yang tidak demokratis, dikarenakan *Senat* mewakili daerah-daerah pedesaan dalam proporsi yang lebih besar daripada perannya di kalangan penduduk Perancis. Keadaan ini berkali-kali diberikan masukan dan peringatan akan tetapi tidak mendapat tanggapan serius. Kontroversi terus berlanjut, hingga *Senat* mendapatkan kecaman dari mantan Perdana Menteri Lionel Jospin.⁵ Keadaan tersebut makin diperparah, karena seolah *Senat* dikuasai oleh Partai sayap kanan Perancis. Anggota *Senat* pada 2004 didominasi oleh partai sayap kanan. Pada 21 September 2008 dilakukan pemilihan anggota *senat* terakhir. Terdapat 343 kursi *senat*, 321 kursi diperuntukkan bagi calon terpilih yakni Perancis Metropolitan dan Departemen Luar Negeri, 2 kursi untuk Caledonia Baru, 2 kursi untuk Mayotte, 1 kursi untuk Saint Piere Dan Miquelon, 1 untuk Saint Barthelemy, 1 untuk Saint Martin, 3 untuk wilayah seberang laut, dan 12 kursi untuk Nasional Perancis Luar Negeri. *National Assembly* dipilih secara langsung dari masing-masing konstituen dengan sistem dua suara, untuk masa jabatan selama lima tahun. Kekuatan untuk membubarkan cabinet dimiliki *National Assembly* dan sangat mayoritas dalam menentukan suara pemerintah. Pemilihan dilakukan pada tanggal 10 hingga 17 Juni 2007. Dalam *National Assembly* ada 577 kursi, 555 kursi untuk Metropolitan

⁵*Senat Perancis* (akses 20 Mei 2010); sumber http://id.wikipedia.org/wiki/senat_perancis

Perancis, 15 kursi untuk Departemen Luar Negeri, 7 kursi untuk suara mayoritas. Di dalam National Assembly ada delapan komite yang memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan di Perancis.⁶ *Cultural Affairs and Education Committee*, merupakan komite yang mengurus masalah pendidikan, penelitian, informasi, olahraga, budaya dan intelektual. *Economic Affairs Committee*, komite yang bertugas mengaplikasikan penelitian dan inovasi, mengawasi industri dan energi, penciptaan eksternal maupun internal, mengawasi komunikasi elektronik, menyusun perencanaan kota dan rumah. *Foreign Affairs Committee*, menangani urusan kebijakan luar negeri dan Eropa, perjanjian dan persetujuan luar negeri, mengurus organisasi internasional, kerjasama luar negeri dan perkembangannya. *Social Affairs Committee*, yakni komite yang mengurus masalah sosial integrasi dan persamaan warganegara, masalah karyawan dan buruh, solidaritas dan kesehatan, serta mengadakan profesional training. *National Defence and Armed Forces Committee*, komite ini turun tangan mengurus masalah militer, hal yang berhubungan dengan keamanan nasional, serta hukum militer. *Sustainable Development, Spatial and Regional Planning Committee*, komite yang memiliki tanggung jawab dalam perencanaan regional, pembangunan, infrastruktur, dan pekerja umum. *Finance, General Economy and Budgetary Monitoring Committee*, komite ini bertugas untuk mengawasi keuangan, mengawasi jalannya ekonomi negara. *Constitutional Acts, Legislation and General Administration Committee*, komite yang bertugas mengatur undang-undang konstitusional dan institusi.

⁶ *Rule of Procedure of the National Assembly* (akses 30 Maret 2011); sumber <http://www.assemblee.nationale.fr/english/index.asp>.

4. Partai Politik

Perancis terdiri atas banyak partai politik, atau multipartai. Multipartai ini mengakibatkan persaingan dalam politik sangat beragam, baik antara kaum laki-laki dan perempuan. Sedikitnya ada 20 partai politik di Perancis. Beberapa diantaranya merupakan partai besar, seperti *Partai Sosialis(PS)* dan *Partai Union for a Popular Movement (UMP)*. Kedua contoh partai ini pada pemilihan lalu menduduki tempat yang paling populer dan memperoleh suara terbanyak pada pemilihan periode ke sembilan Perancis. Partai politik Perancis terbagi dalam posisi-posisi sesuai dengan misi yang mereka usung. Partai Sosialis mengusung nilai-nilai sosialis dalam pemahaman dan ideologi partainya. Partai politik Perancis terbagi kedalam beberapa aliran, LeftWings, RightWings, Greens, Centrists, Former Parties of Note dan FarRight (lampiran 3).

Partai yang *pertama* adalah *Democratic Movement Party*, merupakan partai Centris yang menganut paham sosial liberal dan liberal, yang dipimpin oleh Francois Bayrou. Partai ini berusaha merubah upah minimum menjadi 1000 Euro perbulan, setelah dipotong pajak. Benefit bagi pengangguran diganti setelah enam bulan dengan upah kegiatan minimum yang mewajibkan mereka mengambil pekerjaan paruh waktu yang ditawarkan pejabat lokal dan organisasi relawan. Usaha kecil, profesi bebas dan perusahaan yang mengharuskan pekerja ahli mendukung untuk mempekerjakan karyawan baru untuk membayar biaya social, serta reformasi jam kerja sebanyak 35 jam per minggu. Reformasi juga ditawarkan dalam bidang pendidikan yang berusaha memerangi buta huruf, menganalisa terhadap pendidikan hukum di sekolah, serta menerapkan hidup dalam

masyarakat yang nantinya diajarkan oleh guru dan pelatih. Berkenaan dengan institusi, program pertama yang ditawarkan partai ini adalah parlemen dipilih dengan cara yang lebih proporsional. Kedua, pasal-pasal yang membolehkan pemerintah untuk memblok peraturan atau untuk mengadopsinya tanpa pemilihan agar dihilangkan dari konstitusi, selain itu oposisi harus diberi kontrol lebih tentang apa yang diperdebatkan dalam parlemen. Membuat peraturan yang lebih tegas tentang wakil rakyat yang harus hadir di parlemen dan harus memilih. Informasi dirasa sangat penting untuk masyarakat, sehingga partai ini berusaha mendukung dengan memfasilitasi sarana internet mulai dari penyediaan dana hingga pengadaan sarana di berbagai instansi pemerintah.

Kedua, Partai National Front, partai politik ini merupakan partai yang memperjuangkan penegakan hukum serta anti imigrasi. Jean Marie Le Pen memberikan perhatian lebih terhadap imigrasi, partai ini memberlakukan deportasi bagi siapa saja yang tidak memiliki surat-surat keimigrasian yang benar, mendirikan kembali kebijakan kriminal bagi orang asing, serta menghapuskan pengaman sosial bagi orang asing, dan mengadakan peleburan otomatis bagi kewarganegaraan Perancis, serta mengurangi izin kerja dari sepuluh tahun menjadi hanya tiga tahun. Program yang ditawarkan merupakan preferensi nasional yang mendahulukan warga negara Perancis dalam memperoleh pekerjaan. Selain itu, mereka akan mengadakan potongan pajak untuk menstimulasi konsumsi dan investasi. Le Pen akan menerapkan hukuman mati bagi mereka yang melanggar

Ketiga, Partai Sosialis (Socialist Party) merupakan partai sayap kiri (Left Wing), yang mengusung nilai-nilai Sosialisme dan berusaha menerapkan demokrasi sosial. Partai politik ini dipimpin oleh Martin Aubry, pada tahun 2007 saat pemilihan presiden satu-satunya calon presiden perempuan yang mampu mengalahkan kandidat laki-laki adalah Segolene Royal dari partai Sosialis. Partai sosialis merupakan partai yang sangat mendukung dan peduli terhadap perempuan. Program yang menjamin adanya undang-undang mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Untuk menciptakan keamanan, partai Sosialis berusaha meningkatkan jumlah polisi berpengalaman dan rehabilitasi terhadap pelanggaran hukum untuk anak-anak. Royal merubah kontrak kerja jangka pendek menjadi permanen untuk menangani pekerja. Perusahaan profit yang memecat karyawannya akan kehilangan bantuan dari pemerintah. Dalam bidang pendidikan Royal berjanji akan memberikan investasi sepenuhnya pada pendidikan Negara.

Keempat, Partai Union for a Popular Movement (UMP). UMP merupakan partai sayap kanan (Right Wing), yang dipimpin oleh Jean Francois Cope. Partai ini merupakan partai konservatif, liberal konservatis dan nasionalis. Partai ini mengusung Nicolas Sarkozy sebagai kandidat presiden pada 2007. Program yang ditawarkan oleh partai politik ini adalah berusaha menyusun hukum minimum untuk setiap pelanggaran. Pekerjaan menjadi sorotan utama dimana seorang pencari kerja dilarang menolak pekerjaan lebih dari tiga kali, kemudian pengadaan kontrak yang bisa membuat lebih mudah untuk memecat karyawan atas dasar ekonomi. Mengurangi hal imigrasi, Sarkozy akan mewajibkan para imigran untuk

belajar baca tulis dalam bahasa Perancis serta berusaha memerangi perkawinan sejenis. Diantara banyak partai politik Perancis sedikit sekali partai yang memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, walaupun partai Sosialis hanya menyoroti masalah kekerasan dalam rumah tangga. Pada kenyataannya banyak hal yang seharusnya diangkat dan menjadi pokok bahasan dalam program-program kerja partai politik tersebut.

Kelima, Partai Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR). LCR atau Revolutionary Communist League, dipimpin oleh Oliver Besancenot merupakan partai signifikan minor di Perancis. Posisi politik partai ini adalah luxemburgism, trotskyist.

3. Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Perancis

Negara Eropa merupakan Negara yang menjunjung tinggi Demokrasi. Dalam membangun demokrasi partisipasi dan keterlibatan masyarakat untuk ikut dan mengatur jalannya negara sangat dihormati. Ini berarti demokrasi bukan hanya pemilu yang terbatas pada pemilihan presiden dan parlemen, tapi juga keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat tanpa ada pembedaan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Termasuk golongan perempuan, yang memiliki potensi besar untuk Negara. Demokrasi seperti ini sangat mendukung perempuan untuk aktif dalam kehidupan politik.

Pada pengalaman Perancis keterwakilan perempuan sangat penting, dalam

menggolkan instrumen hukum yang sensitif gender yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan. Walaupun banyak kalangan yang beranggapan perempuan itu tidak akan mampu memikul tanggung jawab sebagai wakil rakyat dan duduk dalam pemerintahan, akan tetapi adanya kaum hawa ini dalam politik sangat diperlukan, terutama dalam hal memperjuangkan nasib kaum mereka sendiri. Perempuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan kaumnya dalam politik. Adapun pentingnya perempuan dalam politik, yang *pertama* Menyuarakan isu perempuan dan menjalankan agenda perempuan. Keterlibatan Perempuan dalam politik diharapkan mampu menyuarakan aspirasi dari kaumnya dan menjalankan agenda-agenda yang mendukung hak-hak perempuan dalam segala bidang. Banyaknya isu-isu yang berkembang dimasyarakat tentang penindasan kaum perempuan di ranah privat maupun publik akibat bias gender perlu penanganan serius. Kurangnya perhatian dari pemerintah untuk membahas masalah yang dihadapi kaum perempuan terhadap isu kekerasan, pelecehan seksual, perdagangan ilegal menjadi hal yang sangat kompleks yang perlu diangkat kepermukaan dan diperjuangkan oleh perempuan yang berkecimpung dalam politik. Kepentingan yang *kedua*, adalah mempengaruhi kebijakan yang diambil pemerintah. Peran kaum perempuan tidak hanya mengangkat isu-isu ketertindasan dan diskriminasi saja. Fungsi utama mereka turut andil dalam pengambilan keputusan dan menentukan kebijakan sangat berperan penting. Pada kenyataannya perempuan yang memiliki peran sama dengan kaum laki-laki dalam politik, lebih banyak tidak dapat menggunakan wewenangnya karena mereka merupakan kaum

minoritas. Sehingga mereka lebih banyak mempengaruhi kebijakan yang diambil pemerintah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pada saatnya nanti kaum perempuan akan menjadi penentu kebijakan yang berkaitan dengan berbagai isu, terutama kekerasan terhadap perempuan karena dirasa lebih mengenal kaum mereka sendiri. Kebijakan-kebijakan yang diambil, diharapkan memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan kaum perempuan, sehingga mampu mengurangi bahkan menghentikan ketimpangan dan penindasan. Kepentingan *ketiga*, meningkatkan representasi perempuan dalam politik. Peran perempuan yang paling penting adalah, bagaimana meningkatkan representasi mereka dalam parlemen. Ini merupakan tugas bagi para politisi perempuan untuk menjadikan kaum minoritas tersebut berkualitas dan mampu disejajarkan dengan laki-laki. Peran ini menjadi perhatian yang sangat besar di Perancis. Gerakan untuk meningkatkan representasi perempuan sudah didengungkan dalam bentuk parity. Partai politik terlibat langsung dalam mempublikasikan konsep parity dalam konstitusi.

Pemilu Perancis yang memungkinkan apabila wakil kehilangan kursi pada *National Assembly* maka wakil tersebut bisa menjadi anggota dewan di daerah. Kondisi ini menyebabkan kaum perempuan dan etnis di Perancis sangat kurang diinginkan.⁷ Pada kenyataannya, inilah yang harus dihadapi perempuan Perancis. Perempuan Perancis memerangi ketertindasan mereka dalam politik, usaha ini dipicu revolusi Perancis. Mereka berusaha melawan monarki dan aristokrasi untuk

⁷ Karen Bird, "The Political Representation of Women and Ethnic Minorities in Established Democracies: A Framework for Comparative Research" *Canada*, 11 November 2003 (akses 05 Agustus 2011); Sumber dari Aalborg University.

memperoleh hak-hak politik mereka. Hak-hak politik perempuan menjadi tidak stabil akibat terjadinya revolusi, yang berubah-ubah sesuai dengan rezim yang berlaku.

Hak pilih yang diperoleh perempuan Perancis pada tahun 1944, berbuntut pada keinginan mereka sebagai anggota parlemen. Keinginan mereka ditunjukkan tidak lama setelah itu perempuan Perancis menduduki 38 kursi dari 542 kursi di *National Assembly*. Pada tahun 1978, representasi perempuan dalam National Assembly hanya sebesar 4,1 persen, kemudian pada tahun 1981 sebesar 5,3 persen, tahun 1988 sebesar 5,7 persen.⁸ peningkatan ini menunjukkan tindakan protes terhadap representasi mereka yang sangat rendah sebelumnya pada tahun 1968 dengan 3,3 persen. Representasi perempuan akan tetap rendah apabila mereka tidak memiliki kesempatan pendidikan dan profesi yang menunjang untuk mendapatkan kekuasaan politik.⁹ Dalam pemilihan anggota parlemen pada tahun 1997 representasi perempuan dalam parlemen sebesar 10,9 persen, yakni 63 perempuan dari 577 kursi dalam parlemen. Sedangkan dalam *senat* Perancis, pada tahun 1977 keterwakilan mereka sangat rendah yakni 1,7 persen, kemudian di tahun 1980 sampai dengan 1986 mencapai hanya 2,8 persen. Pada pemilihan tahun 1998 representasi mereka hanya mencapai 5,9 persen, yakni sejumlah 19 orang dari 321 kursi dalam parlemen.¹⁰ Persentase keterwakilan mereka dapat ditingkatkan setelah amandemen konstitusi.

⁸ Jocelyne Praud, "Gender Parity Reforms In France And Belgium: A Comparative Perspective," *Vancouver*, 4-6 June, 2008. (Akses 05 Agustus 2011); Sumber University of British Columbia.

⁹ Olivia Kuhlman, "Inequities of Contemporary French Women" *Claremont Colleges*, 29

Para politisi Sayap Kiri Perancis yang berhasil, Simone Veil, Francois Giroud dan Perdana Menteri Perempuan pertama Edith Cresson. Mereka memiliki masukan politik yang sangat penting berkaitan isu perempuan. Pada tahun 1974 Francois Giroud menjadi menteri pertama yang mengusung isu perempuan. Pada tahun 1991, presiden Francois Mitterrand mengangkat Edith Cresson sebagai Perdana Menteri, walaupun hanya menjabat selama enam bulan, Cresson merupakan Perdana Menteri perempuan pertama dan satu-satunya di Perancis. Pada saat Cresson menjabat mengeluarkan kebijakan dalam hal ekonomi. Keterwakilan perempuan dalam parlemen Perancis dapat kita lihat dimana lima belas anggota Kabinet Sarkozy tiga diantaranya adalah perempuan.

B. Parity sebagai Hukum

Pada awal perjuangan Feminis di Perancis untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik dikenal dengan kuota. Penerapan kuota untuk menuntut keterwakilan perempuan dalam parlemen dirasa tidak mampu mewujudkan cita-cita perempuan untuk duduk dalam parlemen. Rendahnya jumlah perempuan dalam parlemen yakni, 5,9 persen menyebabkan para feminisme Perancis berusaha mencari formula baru untuk memperoleh undang-undang yang menjamin keterwakilan mereka dalam parlemen. Diperkenalkanlah konsep parity yang menjadi sebuah konstitusi dan menjamin mereka dalam politik Perancis. Perancis adalah negara pertama yang menerapkan parity, namun parity yang diamanatkan konstitusi ini belum sepenuhnya menjadikan perempuan

1. Pengertian Parity

Konsep Parity digunakan untuk menjelaskan representasi persamaan laki-laki dan perempuan dalam pembuatan keputusan politik. Parity berbeda secara fundamental dari kuota yang menyiratkan hak perwakilan khusus untuk kaum minoritas, sementara Parity menyerukan pembagian kekuasaan yang adil. Parity sangat penting bagi kesejahteraan umum masyarakat, pendukung Parity mengklaim seks sebagai penyebab perbedaan yang universal antara manusia. Mereka berpendapat bahwa pemahaman kesetaraan dan representasi serta subyek warga universal dianggap hanya berlaku untuk laki-laki. Pendukung Parity berusaha mendefinisikan kepada Dewan Konstitusi (*Constitutional Council*), bahwa Parity berusaha memperjuangkan persamaan dalam hukum dan representasi dari keseluruhan bukan sebagian. Parity digunakan untuk merancang sebuah pembedaan normatif baru untuk kuota yang konsisten dengan kerangka dari republik Perancis. Mereka mengusulkan reformasi konstitusi untuk menyediakan perwakilan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan politik, ini merupakan satu-satunya cara untuk mengenali dua jenis kelamin dari warga negara.

Parity merupakan Amandemen Konstitusi, yakni memberikan akses yang sama terhadap laki-laki dan perempuan dalam pemilihan.¹¹ Amandemen konstitusi pasal 3 menyatakan “the law favor the equal access of woman and men to electoral mandates and elective functions”. Sedangkan pasal 4 menyatakan “contribute to the execution of the principle set forth in the last section of article 3

¹¹ Yvone Gilligan, “Bringing Women In: Global Strategies for Gender Parity In Political Representation” *Newbury, England* (Agos 16 Juli 2011); Sumber American University

under the condition determined by the law”.¹² Amandemen konstitusi ini menyatakan, kesempatan yang sama dalam hal politik untuk laki-laki dan perempuan akan diatur dalam hukum, serta pasal 4 yang menyatakan partai-partai politik harus berkontribusi terhadap prinsip yang tercantum dalam pasal 3 yang telah ditentukan oleh hukum. Amandemen ini merupakan sebuah pencapaian politik perempuan, aktivis feminis dan kaum intelektual. Untuk menerapkan prinsip ini, partai politik juga harus diberikan peran. Prinsip ini memberikan efek Parity Law pada 6 Juni 2000 dan mengharuskan partai politik memenuhi jumlah kandidat sebanyak lima puluh persen, dari setiap pemilihan legislatif, baik itu Dewan Eropa, daerah, dan perwakilan kota.

2. Lahirnya Parity Law

Menyusul keputusan Constitutional Council 1982, upaya untuk meningkatkan kuota dalam partai Sosialis kehilangan momentum. Selama beberapa tahun hanya sedikit peningkatan yang terjadi. Pada tahun 1986, perempuan Perancis merasa sangat optimis karena sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem Proportional Representative.¹³ Banyak aktivis perempuan mengantisipasi bahwa adopsi PR secara substansial akan meningkatkan jumlah perempuan yang terpilih, dan untuk alasan ini mereka tidak memobilisasi luas dalam partai-partai untuk memastikan bahwa perempuan ditempatkan sebagai kandidat teratas pada daftar calon. Akibatnya peningkatan

¹² Mona Lena Krook, “National Solution or Model from Aboard?” *United States*, 3-19 May, 2007. (akses 10 January, 2011); sumber Washington University in St. Louis

¹³ Mona Lena Krook, “Competing Claims: Quotas for Women and Minorities in India” *Journal of Democracy*, 26(3), 2005 (akses 10 January, 2011); sumber Washington

sejumlah 24,7 persen perempuan dari semua kandidat, namun persentase yang terpilih dalam National Assembly hanya 5,3 persen menjadi 5,9 persen. Partai Sosialis memiliki kuota yang mendekati sebanyak 18,9 persen, akan tetapi karena pemimpin Partai menempatkan mereka dalam list terendah sehingga perempuan hanya 9,8 persen dari deputi Sosialis dalam parlemen. Perempuan merasa kecewa, dengan ini perempuan merasa tertarik untuk mempromosikan representasi perempuan dan melihat inspirasi untuk gerakan diluar nasional. Antara tahun 1986 dan 1988, kaum perempuan aktif dalam gerakan Rainbow, yang mendesak Parity yang memperjuangkan persamaan laki-laki dan perempuan dalam segala bentuk pembuatan kebijakan. Setelah gerakan dibubarkan pada 1988, banyak dari anggota gerakan ini bergabung dengan partai Green dan memasukkan prinsip Parity dalam undang-undang partai.¹⁴

Konsep Parity muncul di akhir tahun 1980 yang diajukan oleh Dewan Eropa. Konsep parity ini dibawa oleh intelektual dan gerakan feminis yang menekan pihak berwenang di awal 1990-an.¹⁵ Konversi Parity ke dalam reformasi hukum dipercepat oleh ide-ide intelektual. Ide-ide yang diusung membawa feminis pada pergulatan panjang untuk memperoleh hak politik sebagai anggota legislatif. Seringkali perjuangan mereka mendapatkan kendala, mereka merasa tidak dianggap dan tidak terlihat dalam hukum. Perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan dalam hukum dan memiliki hak yang sama dengan laki-laki terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Walaupun membutuhkan

¹⁴ Ibid.

¹⁵ *Melembagakan Paritas: Pengalaman Prancis* (Akses 05 Februari 2011); sumber <http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=enid&u=http://www.idea.int/publications/v>

waktu yang lama, feminisme berhasil menanamkan prinsip-prinsip mereka, dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. COE (*Council of Europe*) memulai serangkaian perdebatan mengenai pendalaman dan penguatan demokrasi di Eropa. Berbeda dengan Uni Eropa (UE), yang pada akhir 1980 difokuskan pada hak-hak individu sebagai pelaku ekonomi, COE mempromosikan hak-hak individu sebagai aktor politik. Pada tahun 1986, menyelenggarakan Konferensi Menteri Eropa pertama untuk Kesetaraan Antara Perempuan dan Pria (*European Ministerial Conference on Equality Between Women and Men*), dimana negara anggota mampu meningkatkan kehadiran dan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik, merupakan ciri utama demokrasi.

Pada tahun 1988, mereka menandatangani Deklarasi Kesetaraan Perempuan dan Pria (*European Ministerial Conference on Equality Between Women and Men*) menyeru COE merancang kebijakan dan strategi untuk mengintegrasikan perempuan ke semua tingkat kehidupan politik. Untuk tujuan ini, Komite Eropa untuk Kesetaraan Antara Perempuan dan Pria (*European Committee for Equality Between Women and Men/ CEEG*) mengadakan seminar ahli di Strasbourg pada tahun 1989 untuk berbagi dan mengembangkan mekanisme mempromosikan akses perempuan dalam politik. Dua kontribusi utama perdebatan dari artikel oleh Marit Halvorsen, menguraikan pengalaman Norwegia dalam membawa lebih banyak perempuan ke dalam politik, dan Elisabeth Sledziewski, menguraikan argumen normatif baru untuk meningkatkan kehadiran politik perempuan berdasarkan perbedaan ontologis antara perempuan

mengatasi keputusan COE tahun 1982, tetapi juga mengakui bahwa dukungan COE untuk demokrasi paritas bisa memberikan legitimasi penting bagi upaya mereka untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik. Sistem Parity mendapatkan dukungan yang sangat luas di Perancis, yakni dari masyarakat Sipil, Partai Politik, aktivis feminis, Akademisi, Politisi Sayan Kiri dan Sayan Kanan